

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN
TENTANG
KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
3. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
5. Jabatan adalah jabatan manajerial, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
9. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini menetapkan Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan:
 - a. Manajerial; dan
 - b. Nonmanajerial.
- (3) Manajerial dan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yaitu jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Pasal 3

Jabatan dan Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Jabatan dan Kelas Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Jabatan Operator Layanan Operasional ditempatkan sesuai dengan syarat pendidikannya.

Pasal 6

Dalam hal PNS dengan nomenklatur jabatan Operator Layanan Operasional tidak memiliki syarat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS ditempatkan pada Operator Layanan Operasional berdasarkan Kelas Jabatan yang diampu sebelumnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 Nomor 779) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Cimahi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN

TENTANG
KELAS JABATAN

JABATAN MANAJERIAL

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
I.	SEKRETARIAT DAERAH	
1.	SEKRETARIS DAERAH	15
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	14
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14
4.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	14
5.	STAF AHLI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13
6.	STAF AHLI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	13
7.	STAF AHLI ADMINISTRASI, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13
8.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	12
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM	12
10.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12
11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	12
12.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12
13.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12
14.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12
15.	KEPALA BAGIAN UMUM	12
16.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12
17.	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL	9
II.	SEKRETARIAT DPRD	
1.	SEKRETARIS DPRD	14
2.	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	12
3.	KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	12
4.	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	12
5.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	9
III.	INSPEKTORAT	
1.	INSPEKTUR	14
2.	SEKRETARIS INSPEKTORAT	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	9
4.	INSPEKTUR PEMBANTU I	12
5.	INSPEKTUR PEMBANTU II	12
6.	INSPEKTUR PEMBANTU III	12
7.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	12
IV.	DINAS PENDIDIKAN	
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	14
2.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	11
5.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	9
6.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	9
7.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	11

8.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR	9
9.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	9
10.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	11
11.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9
12.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9
13.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11
14.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	9
15.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9
V.	DINAS KESEHATAN	
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	14
2.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI	9
5.	KEPALA BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT	11
6.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	11
7.	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	11
VI.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14
2.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG BINA MARGA	11
6.	KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	11
7.	KEPALA SEKSI BINA KONSTRUKSI	9
8.	KEPALA BIDANG TATA RUANG	11
9.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG	9
VII.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14
2.	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11
6.	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11
VIII.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14
2.	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	11
6.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	9
7.	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN	9
8.	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11
9.	KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	9

10.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9
11.	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MASYARAKAT	11
12.	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN	9
13.	KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9
IX.	DINAS SOSIAL	
1.	KEPALA DINAS SOSIAL	14
2.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	11
6.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	11
7.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KEBENCANAAN	9
8.	KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL	9
9.	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA	9
X.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14
2.	SEKRETARIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11
6.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11
7.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11
8.	KEPALA SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	9
9.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA	9
10.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI DAN EKONOMI MASYARAKAT	9
XI.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
1.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	14
2.	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	11
6.	KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	11
7.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	11
XII.	DINAS PERHUBUNGAN	
1.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14
2.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	11
6.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS	9

7.	KEPALA SEKSI PERPARKIRAN	9
8.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM	11
9.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN	9
10.	KEPALA SEKSI TERMINAL	9
XIII.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14
2.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11
6.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11
7.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	11
XIV.	DINAS TENAGA KERJA	
1.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	14
2.	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11
6.	KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9
7.	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	11
XV.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
1.	KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	14
2.	SEKRETARIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	11
5.	KEPALA BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	11
6.	KEPALA SEKSI PERIKANAN	9
XVI.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14
2.	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	11
5.	KEPALA SEKSI KEBUDAYAAN	9
6.	KEPALA SEKSI PARIWISATA	9
7.	KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11
XVII.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14
2.	SEKRETARIS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
XVIII.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14
2.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12

3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	11
6.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	11
7.	KEPALA BIDANG PENAAATAN HUKUM LINGKUNGAN	11
XIX.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14
2.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK	11
6.	KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK	9
7.	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN	11
8.	KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TELEMATIKA	9
XX.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	
1.	KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	14
2.	SEKRETARIS DINAS ARSIP DAN PEPUSTAKAAN	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	11
5.	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	11
XXI.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	14
2.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI	11
6.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	11
7.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	11
8.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	11
9.	KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH	11
XXII.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14
2.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	11
5.	KEPALA SUBBIDANG KEBIJAKAN ANGGARAN	9
6.	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	9
7.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN	11
8.	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	9
9.	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI	9
10.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11
11.	KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9

12.	KEPALA SUBBIDANG PEMINDAHTANGANAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	9
XXIII.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
1.	KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	14
2.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI PENDAPATAN	11
5.	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH	9
6.	KEPALA SUBBIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN	9
7.	KEPALA BIDANG PENERIMAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN	11
8.	KEPALA SUBBIDANG PEGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENYULUHAN PAJAK DAERAH	9
9.	KEPALA SUBBIDANG PENERIMAAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN	9
XXIV.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	14
2.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	11
6.	KEPALA BIDANG DATA, KEPANGKATAN DAN KESEJAHTERAAN	11
XXV.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14
2.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA	11
6.	KEPALA SUBBIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	9
7.	KEPALA SUBBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA	9
8.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	11
9.	KEPALA SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI	9
10.	KEPALA SUBBIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	9
11.	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	11
12.	KEPALA SUBBIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN	9
13.	KEPALA SUBBIDANG PENANGANAN KONFLIK	9
XXVI.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13
2.	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9
3.	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	9
4.	KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	9

5.	KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	9
XXVII.	KECAMATAN	
1.	CAMAT	12
2.	SEKRETARIS KECAMATAN	11
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9
4.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9
5.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	9
6.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9
7.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	9
8.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN	9
9.	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN	9
XXVIII.	KELURAHAN	
1.	LURAH	9
2.	SEKRETARIS KELURAHAN	8
3.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8
4.	KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	8
5.	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN	8
XXIX.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT	
1.	DIREKTUR	13
2.	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN	12
3.	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG	11
4.	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	11
5.	WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	12
6.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	11
7.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11
XXX.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)	
1.	KEPALA UPTD	9
2.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN
TENTANG
KELAS JABATAN

NONMANAJERIAL

A. JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	JENJANG	KELAS JABATAN
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
2.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
3.	ANALIS KEUANGAN NEGARA	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	8
		PELAKSANA/ TERAMPIL	7
4.	POLISI PAMONG PRAJA	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/ TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/ PEMULA	5
5.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
6.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
7.	ANALIS KEBIJAKAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
8.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
9.	APOTEKER	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9

		AHLI PERTAMA	8
10.	ARSIPARIS	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA /TERAMPIL	6
11.	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
12.	ASISTEN APOTEKER	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
13.	AUDITOR	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
14.	BIDAN	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
15.	DOKTER	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	9
16.	DOKTER GIGI	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	9
17.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
18.	ENTOMOLOG KESEHATAN	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
19.	FISIOTERAPIS	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6

20.	FISIKAWAN MEDIS	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
21.	GURU	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
22.	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
23.	INSTRUKTUR	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
24.	MEDIK VETERINER	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
25.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
26.	NUTRISIONIS	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
27.	OKUPASI TERAPIS	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
28.	ORTOTIS PROSTETIS	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
29.	PAMONG BELAJAR	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
30.	PAMONG BUDAYA	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA /TERAMPIL	6
31.	PEKERJA SOSIAL	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
32.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	AHLI MADYA	11

		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
33.	PENATA ANESTESI	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
34.	ASISTEN PENATA ANESTESI	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
35.	PENATA RUANG	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
36.	PENELITI	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
37.	PENERA	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	8
		PELAKSANA/TERAMPIL	7
38.	PENILIK	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
39.	PENGANTAR KERJA	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
40.	ADYATAMA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
41.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
42.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
43.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
44.	PENGAWAS SEKOLAH	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
45.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
46.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12

		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
47.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
48.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
49.	PENYULUH PERTANIAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	8
		PELAKSANA/TERAMPIL	7
		PELAKSANA PEMULA	5
50.	PENYULUH SOSIAL	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
51.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
52.	PERAWAT	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
53.	TERAPIS GIGI DAN MULUT	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA	5
54.	PEREKAM MEDIS	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
55.	PERENCANA	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
56.	PEREKAYASA	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	9

		AHLI PERTAMA	8
57.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
58.	PRANATA KOMPUTER	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
59.	PUSTAKAWAN	PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
		AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
60.	PSIKOLOG KLINIS	AHLI PERTAMA	8
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
61.	RADIOGRAFER	AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
62.	SANDIMAN	AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	8
		PELAKSANA/TERAMPIL	7
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
63.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA	5
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
64.	STATISTISI	AHLI PERTAMA	8
		AHLI MUDA	9
		AHLI MADYA	11
65.	ASISTEN STATISTISI	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
66.	SURVEYOR PEMETAAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8

		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
67.	TEKNISI ELEKTROMEDIS	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
68.	TEKNISI JALAN DAN JEMBATAN	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
69.	TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
70.	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
71.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA	5
72.	PENGAWAS KOPERASI	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
73.	ANALIS KETAHANAN PANGAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
74.	PENGAWAS PERDAGANGAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
75.	ANALIS PERKEBUNRAYAAN	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
76.	ANALIS PERDAGANGAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
77.	ANALIS HUKUM	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
78.	PEMBINA JASA KONSTRUKSI	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
79.	PEMADAM KEBAKARAN	PENYELIA	8

		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA	5
80.	ANALIS KEBAKARAN	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
81.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
82.	ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
83.	ANALIS DATA ILMIAH	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
84.	OPERATOR SIAK	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
85.	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
86.	ANALIS KEBENCANAAN	AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
87.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
88.	PENYULUH HUKUM	AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
89.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
90.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
91.	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
92.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
93.	PENATA KELOLA PENYEHAATAN LINGKUNGAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
94.	PENATA LAKSANA PENYEHAATAN LINGKUNGAN	PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7

		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
95.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
96.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
97.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
98.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PELAKSANA/TERAMPIL	6
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
99.	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	PELAKSANA/TERAMPIL	6
		AHLI UTAMA	13
		AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
100.	PENGAMAT TERA	AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
101.	PARAMEDIK VETERINER	PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
102.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL	PELAKSANA PEMULA/PEMULA	5
		AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
103.	PENATA PERIZINAN	AHLI PERTAMA	8
		AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
104.	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN	AHLI PERTAMA	8
		AHLI MUDA	10
		AHLI MADYA	12
		AHLI UTAMA	14
104.	ASISTEN PERPUSTAKAAN	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
105.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PENYELIA	8
		AHLI PERTAMA	8
		AHLI MUDA	9
		AHLI MADYA	11

		PELAKSANA PEMULA/PELAKSANA	5
106.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	AHLI MADYA	11
		AHLI MUDA	9
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
107.	TERAPIS WICARA	PENYELIA	8
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
108.	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA	AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
		AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	8
109	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	PELAKSANA/TERAMPIL	7
		AHLI UTAMA	14
		AHLI MADYA	12
		AHLI MUDA	10
110	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	AHLI PERTAMA	8
		PENYELIA	9
		PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7
		PELAKSANA/TERAMPIL	6
		PELAKSANA PEMULA/ PEMULA	5

B. JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7
2.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	7
3.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7
4.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	7
5.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	7
6.	PENATA KEPROTOKOLAN	7
7.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7
8.	PENELAAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7
9.	FASILITATOR PERDAGANGAN	7
10.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	7
11.	DOKUMENTALIS HUKUM	6
12.	OPERATOR LABORATORIUM	6
13.	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	6
14.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	6
15.	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6

16.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	6
17.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6
18.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6
19.	PENGELOLA SIARAN	6
20.	PENGELOLA TRANTIBUM	6
21.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6
22.	PRANATA TRANTIBUM	5
23.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	5
24.	OPERATOR ALAT BERAT	5
25.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5
26.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5
		4
		3
		1
27.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA